

# Menuju Kota Malang Zero Stunting

Khoirus Syifa Brilian Ramadhan<sup>1</sup>, Hayat<sup>2</sup>, Langgeng Rachmatullah Putra<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Malang, Indonesia; [khoirusyifa@unisma.ac.id](mailto:khoirusyifa@unisma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Malang, Indonesia; [hayat@unisma.ac.id](mailto:hayat@unisma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Malang, Indonesia; [langgengputra@unisma.ac.id](mailto:langgengputra@unisma.ac.id)

IDAROTUNA: Jurnal Administrative  
Science

Vol 6 No 1 May 2025

<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i1.122>

Received: March 20, 2025

Accepted: April 25, 2025

Published: May 29, 2025

**Publisher's Note:** Program Study Office Administrative stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract :** According to Edward III's policy implementation model, which focuses on four key elements—communication, resource availability, implementers' attitudes, and bureaucratic structure—this study examines the Zero Stunting policy's implementation in the Malang City Health Office. The study's primary goals are to assess how well the Zero Stunting policy has been applied and to pinpoint any roadblocks that may be affecting the field's implementation process. In-depth interviews, observations, and documentation studies were used to gather data for this descriptive qualitative study. According to the research findings, regular socialization and the use of a variety of communication platforms have demonstrated that the communication between policy makers and implementers in the field has been going rather smoothly. Resources are generally sufficient, however implementers must deal with tasks that overlap with those of other programs, which affects how well they are implemented. The implementers, however, maintain vigilance and operate the program as efficiently as possible. Although there are currently implementation irregularities in a number of work areas, the majority of implementers exhibit a strong commitment in terms of disposition. Although a cross-sector coordination-supporting bureaucratic framework has been established, its execution has not been entirely successful because of overlapping authorities and a lack of data integration. Therefore, to guarantee the sustainability and efficacy of the Zero Stunting policy in Malang City, it is imperative to build human resource capacity, improve sectoral synergy, and carry out regular evaluations.

**Keywords:** Policy Implementation, Zero Stunting, Malang City

## **Pendahuluan**

Stunting adalah kondisi yang terjadi pada anak akibat kekurangan gizi dalam periode waktu yang panjang, sehingga menyebabkan pertumbuhannya terganggu dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Masalah stunting menjadi salah satu isu gizi global yang mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Isu stunting juga termasuk dalam bagian dari tujuan yang ingin dicapai dalam Sustainable Development Goal (SDGs) sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Upaya penanganan stunting merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan menghapus segala bentuk malnutrisi atau kelaparan, salah satunya dengan meningkatkan ketahanan pangan.

Stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor balita, tetapi juga dimulai sejak kehamilan, karena asupan gizi ibu memiliki peran penting. Kesehatan serta status gizi ibu sebelum, selama, dan setelah kehamilan mempengaruhi perkembangan janin dan berisiko menimbulkan stunting. Beberapa faktor yang memperburuk kondisi ini termasuk kehamilan pada usia muda atau tua, kehamilan yang terlalu sering, dan jarak antar kelahiran yang pendek. Ibu hamil di bawah usia 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR), yang berkontribusi sekitar 20% terhadap kasus stunting (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Kekurangan gizi selama kehamilan dapat menghambat pertumbuhan janin dan meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan berat rendah, yang pada akhirnya berisiko menyebabkan stunting (Tebi, dkk 2021).

Upaya percepatan penurunan stunting pada balita menjadi fokus utama pemerintah, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Target pemerintah adalah mengurangi angka prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Wakil Presiden Republik Indonesia berperan sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat pusat, dengan tugas memberikan arahan kebijakan serta menyampaikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai tantangan dan kendala, agar program penurunan stunting dapat dilaksanakan secara efektif, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai sektor baik di tingkat nasional maupun daerah (stunting.go.id, 2024).

Permasalahan stunting terjadi di banyak kota di Indonesia, salah satunya di kota Malang, Prevalensi Stunting di Kota Malang berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022-2024, pada tahun 2022 angka Stunting di kota Malang berada di angka 25,7%, Tahun 2023 turun menjadi 18%, dan pada tahun 2024 menjadi 17,3%. Data hasil bulan timbang selama periode 2018-2023 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kota Malang terus mengalami penurunan, pada tahun 2022 angkanya berada pada angka 9,1% lalu pada tahun 2023 turun menjadi 8,75%. Pada 17 Maret 2024, prevalensi stunting berdasarkan data bulan timbang tercatat turun menjadi 8,38% (malangkota.go.id, 2024).

Kota Malang memiliki program Zero Stunting, yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota Malang yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting (kekerdilan) pada anak usia di bawah lima tahun. Program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Target utama dari program ini adalah mencapai prevalensi stunting sebesar nol persen di Kota Malang, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Malang tidak bekerja sendiri, melainkan membangun kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan program ini adalah kegiatan Rembuk Stunting, yaitu forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta instansi yang berwenang. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kesepakatan terkait rencana aksi serta program pencegahan stunting yang terpadu, sekaligus memperkuat pemberdayaan peran serta masyarakat melalui keterlibatan aktif organisasi seperti PKK dan kader Posyandu. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemerintah Kota Malang berharap program Zero Stunting dapat dijalankan secara lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kota Malang menerapkan strategi komprehensif untuk mengatasi stunting melalui serangkaian kegiatan, seperti penyuluhan perkawinan terpadu, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, serta memberikan dukungan kepada mereka setidaknya tiga bulan sebelum pernikahan. Program-program ini terbukti efektif menurunkan angka stunting. Selain itu, distribusi tablet suplemen darah kepada remaja putri,

calon pengantin, dan ibu hamil semakin memperhatikan pentingnya persiapan kesehatan bagi ibu hamil (Bintang Aldi, 2024). Pemerintah Kota Malang juga fokus pada peningkatan cakupan ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dan balita yang kekurangan gizi, pendampingan keluarga dengan risiko stunting, serta pencapaian program keluarga berencana. Kelurahan diharapkan menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting, memperkuat pemanfaatan Satu Data Stunting (Satunting), serta menjalin kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan BUMS (ketikmalang.co.id, 2024).

Penanganan stunting pada balita harus dilakukan dengan serius, karena dampaknya dapat menghambat pertumbuhan fisik serta perkembangan motorik dan kemampuan verbal anak, menghambat kecerdasan anak, rentan terhadap penyakit baik penyakit menular maupun tidak menular, produktivitas menjadi semakin rendah pada saat anak memasuki usia dewasa, dan berpeluang berisiko overweight dan obesitas. Jika overweight dan obesitas tidak segera ditangani, dalam jangka panjang akan meningkatkan risiko penyakit degenerative (Noor Latifah, dkk 2024).

Penyakit infeksi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko stunting secara tidak langsung. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara pencegahan dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun yang tidak menular, Dinas Kesehatan Kota Malang mengadakan sosialisasi kepada para koordinator kader PKK. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kader kesehatan mengenai langkah-langkah pencegahan penyakit pada anak yang berhubungan langsung dengan upaya penurunan angka stunting. Salah satu penyebab stunting adalah gizi buruk pada ibu dan anak, yang sering kali dipicu oleh penyakit infeksi seperti tuberkulosis (TBC), diare, Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), serta menurut data (Wulan, 2021), beberapa faktor lain seperti tipus, cacingan, malaria, dan penyakit kronis juga berkontribusi terhadap stunting.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan terstruktur mengenai fakta-fakta, karakteristik,

serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian dalam konteks yang alami. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman menyeluruh terhadap pengalaman subjek penelitian—termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan—yang disajikan dalam bentuk naratif deskriptif dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi alami tanpa adanya perubahan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti..

Senada dengan pendapat Sugiyono (2019), menyatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengkaji kondisi objek alamiah, dengan peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara induktif dan berfokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam data.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena dinilai paling sesuai untuk menggambarkan secara utuh proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Zero Stunting di Kota Malang, dengan melibatkan berbagai perspektif dari pelaksana kebijakan, kader kesehatan, serta masyarakat.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan Zero Stunting di Kota Malang**

Implementasi kebijakan zero stunting menggunakan Model implementasi Edward III, menurut widodo (2010), dalam model ini mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi efektivitas peluncuran suatu kebijakan. Edward III mengemukakan empat isu utama, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, struktur birokrasi:

1. Komunikasi memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa efektif informasi disampaikan kepada publik dan kelompok sasaran. Komunikasi yang utuh dan menyeluruh penting untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan dukungan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), tiga aspek utama dalam komunikasi kebijakan meliputi: penyampaian, kejelasan, dan

konsistensi. Dalam konteks implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang, komunikasi antar pelaksana dinilai berjalan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif para pelaksana, mulai dari tingkat pemerintah kota hingga masyarakat, serta tersedianya alur informasi yang jelas dan konsisten. Kondisi ini sejalan dengan teori Edward III, yang menekankan bahwa tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan berisiko disalahartikan dan mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung tercapainya target Zero Stunting di Kota Malang.

Dalam konteks kebijakan Zero Stunting, Dinas Kesehatan Kota Malang membangun komunikasi lintas sektor guna mendukung implementasi yang efektif.

2. Sumber Daya dalam implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang, sumber daya menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan program. Berdasarkan model implementasi kebijakan dari Edward III (dalam Widodo, 2010), sumber daya mencakup tenaga pelaksana, fasilitas pendukung, serta kewenangan institusi dalam menjalankan program. Sumber daya manusia merupakan komponen krusial yang tidak hanya mencakup jumlah personel, tetapi juga kualitas, kompetensi teknis, keterampilan, dan komitmen para pelaksana kebijakan. Meskipun jumlah tenaga kesehatan di Kota Malang terbilang memadai, keterlibatan mereka dalam berbagai program lain menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan program khusus stunting. Oleh karena itu, keberadaan kader Posyandu, anggota PKK, serta tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam mengisi celah tersebut. Keterlibatan mereka mendukung perluasan cakupan layanan dan edukasi gizi kepada masyarakat secara lebih merata.

Dari sisi fasilitas, Dinas Kesehatan Kota Malang telah memiliki sarana yang relatif memadai. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketimpangan fasilitas antarwilayah, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Hal ini berpotensi menghambat distribusi layanan secara merata dan optimal.

Selain itu, dari segi kewenangan, pengambilan keputusan strategis masih terpusat pada tingkat kepala daerah, yaitu Wali Kota. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan harus menjalin koordinasi yang kuat secara vertikal dan horizontal agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan arah kebijakan daerah.

Secara umum, sumber daya yang tersedia cukup mendukung implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang. Namun demikian, diperlukan penguatan di tingkat teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta pemerataan distribusi sumber daya agar program dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

3. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu komponen penting dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana memiliki komitmen, pemahaman, dan kesediaan untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang menunjukkan tingkat disposisi pelaksana yang tergolong baik. Hal ini terlihat dari semangat kolaboratif yang tinggi antar instansi pelaksana, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Bappeda. Kerja sama antar OPD ini tidak hanya bersifat administratif atau formalitas, tetapi dilandasi oleh kesadaran bersama akan pentingnya upaya penurunan angka stunting secara menyeluruh. Komitmen yang ditunjukkan oleh para pelaksana tidak terbatas pada lingkup birokrasi. Peran aktif juga ditunjukkan oleh kader PKK dan Posyandu yang secara rutin melakukan pendampingan langsung ke masyarakat, terutama dalam kegiatan edukasi dan pemantauan pertumbuhan anak. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan Zero Stunting telah mendapatkan dukungan yang kuat, baik secara struktural maupun sosial.

Namun demikian, semangat dan pemahaman terhadap substansi kebijakan ini belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kota Malang. Ditemukan beberapa pelaksana di lapangan yang masih kurang aktif atau belum memahami kebijakan secara mendalam. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi implementasi di berbagai tingkatan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas pelaksana secara menyeluruh, termasuk melalui pelatihan, sosialisasi berkelanjutan, dan pendampingan teknis. Tujuannya adalah agar disposisi positif tidak hanya muncul di tingkat pusat kebijakan, tetapi juga merata hingga ke pelaksana di tingkat komunitas, sehingga efektivitas pelaksanaan kebijakan Zero Stunting dapat lebih optimal.

4. Struktur birokrasi merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang efektivitas implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Widodo (2010), terdapat dua aspek utama yang dapat meningkatkan kinerja birokrasi, yaitu: penyusunan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, dan penerapan fragmentasi, yakni pembagian tanggung jawab secara sistematis dan terorganisir.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kebijakan Zero Stunting di Kota Malang merupakan kebijakan kompleks yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak lintas sektor. Dalam situasi seperti ini, struktur birokrasi yang solid dan tanggap merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi. Jika struktur birokrasi tidak tertata dengan baik, maka potensi sumber daya yang dimiliki tidak akan dimanfaatkan secara optimal, dan motivasi pelaksana di lapangan dapat menurun, sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun Kota Malang telah memiliki sumber daya dan pelaksana yang kompeten, keberhasilan kebijakan tetap bergantung pada efektivitas koordinasi dan kejelasan pembagian peran antar instansi. Oleh karena itu, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk membangun sistem koordinasi yang efisien dan menyeluruh, dengan dukungan SOP yang terstruktur dan mudah dipahami di semua tingkat pelaksanaan.

Penerapan prinsip fragmentasi menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peran yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang sistematis dan prosedur kerja yang baku, birokrasi dapat menjalankan fungsinya secara lebih terarah, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, struktur birokrasi yang baik bukan hanya mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan Zero Stunting, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap isu kesehatan masyarakat.

## **2. Kendala-Kendala yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Zero Stunting di Kota Malang**

Dalam proses pelaksanaan kebijakan Zero Stunting, Dinas Kesehatan Kota Malang mengalami kendala dalam implementasiannya, Kendala-kendala ini muncul dari

berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Zero Stunting di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi yaitu faktor ekonomi, sumber daya, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang gizi:

- a. Faktor ekonomi menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, banyak keluarga berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Informan menyebutkan bahwa dalam kondisi keterbatasan ekonomi, masyarakat sering kali dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan makan bergizi dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti tempat tinggal, pendidikan, atau biaya hidup harian. Akibatnya, pemenuhan gizi anak belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan rumah tangga. Keterbatasan daya beli ini berdampak langsung pada rendahnya konsumsi pangan bergizi, terutama sumber protein hewani dan sayuran segar yang harganya relatif tinggi.
- b. Keterbatasan sumber daya alam serta akses terhadap bahan pangan bergizi menjadi salah satu hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang, terutama di wilayah yang berlokasi jauh dari pusat kota. Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua daerah memiliki akses yang mudah ke pasar yang menyediakan sumber protein hewani, sayuran, dan buah-buahan segar. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pilihan pangan bagi keluarga, yang berdampak pada pola konsumsi yang kurang beragam dan tidak seimbang secara gizi. Selain faktor geografis, pemanfaatan potensi lokal seperti lahan pekarangan untuk kebun gizi masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendukung serta rendahnya kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya tersebut. Minimnya inisiatif pengembangan pangan lokal ini mengindikasikan perlunya dukungan dan intervensi lintas sektor, khususnya dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk mendorong ketersediaan pangan sehat secara mandiri di tingkat rumah tangga. Temuan ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan stunting tidak dapat hanya mengandalkan intervensi medis atau pelayanan kesehatan, tetapi juga harus melibatkan strategi jangka panjang yang menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal

secara berkelanjutan. Pendekatan multisektor menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak yang sehat, terutama dalam konteks ketahanan pangan keluarga.

- c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi, khususnya pada masa emas pertumbuhan anak, menjadi tantangan serius dalam implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, banyak orang tua yang berlatar belakang pendidikan rendah belum memahami pentingnya pemberian nutrisi lengkap bagi anak, dan masih beranggapan bahwa makan cukup berarti sekadar kenyang, bukan bergizi. Kurangnya literasi gizi ini menyebabkan praktik pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak, sehingga meningkatkan risiko stunting. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, posyandu, dan edukasi gizi juga masih rendah. Hal ini menghambat penyebaran informasi yang merata mengenai pola makan seimbang dan pentingnya asupan protein hewani sebagai bagian dari intervensi gizi spesifik. Temuan ini menegaskan bahwa upaya edukatif dan pemberdayaan masyarakat harus diperkuat, tidak hanya melalui pendekatan formal dari institusi kesehatan, tetapi juga melalui peran aktif tokoh masyarakat dan kader di tingkat lokal untuk memastikan pesan gizi sampai dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi, khususnya pada masa emas pertumbuhan anak, menjadi salah satu tantangan krusial dalam implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, banyak orang tua khususnya yang berlatar belakang pendidikan rendah belum memahami pentingnya pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang. Masih banyak yang memiliki persepsi keliru bahwa makan cukup identik dengan kenyang, tanpa mempertimbangkan kandungan gizi dalam makanan. Kurangnya literasi gizi ini berkontribusi pada praktik pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya stunting. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukatif seperti penyuluhan gizi, posyandu, dan forum kesehatan masih tergolong rendah. Hal ini menghambat penyebaran informasi secara merata, khususnya mengenai pola makan seimbang dan pentingnya asupan protein hewani sebagai bagian

dari intervensi gizi spesifik. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi dalam penanggulangan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan medis atau teknis. Diperlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran gizi di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, peran aktif tokoh masyarakat, kader posyandu, dan lembaga lokal sangat penting dalam menyampaikan informasi gizi secara tepat dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya edukasi ini juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, agar mereka tidak hanya memahami pentingnya gizi, tetapi juga mampu menerapkan pola konsumsi sehat secara mandiri dan konsisten. Dengan pendekatan yang komprehensif dan multisektor, kebijakan Zero Stunting di Kota Malang diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Zero Stunting di Kota Malang dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara kolaboratif lintas sektor dengan fokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan berbagai instansi serta melibatkan kader PKK dan Posyandu dalam pelaksanaan di lapangan. Komunikasi antar pelaksana berjalan cukup efektif melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan pemanfaatan media digital, sementara disposisi pelaksana menunjukkan sikap dan tanggung jawab yang positif. Namun demikian, implementasi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dari faktor ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, keterbatasan akses terhadap bahan pangan bergizi di wilayah tertentu, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi pada masa pertumbuhan anak. Oleh karena itu, selain penguatan koordinasi dan sumber daya, diperlukan juga pendekatan edukatif dan peningkatan literasi gizi secara menyeluruh agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

## Referensi

- Aldi, B., Najah, S., & Hayat, H. (2024). Penanggulangan Stunting Melalui Program SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) di Kota Malang. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5(2), 160-169.
- Dari, N. W. (2021). *Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Hayat, H. (2018). *Kebijakan Publik* [Internet], Malang, Intrans Publishing. Tersedia dari: Google Book. [diakses 25 Juli 2024].
- Hayat, H. (2019). *Isi Kebijakan Publik* [Internet], Malang, Intrans Publishing. Tersedia dari: Google Book. [diakses 10 Agustus 2024].
- Latifah, N., Fajrini, F., Romdhona, N., Herdiansyah, D., Ernyasih, E., & Suherman, S. (2024). Systematic Literature Review: Stunting pada Balita di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 20(1), 55-73.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* [Internet], Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Tersedia dari: Google Book [diakses 20 Agustus 2024].
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* [Internet]. Bandung: Alfabeta. Tersedia dari: Google Book. [diakses 20 Agustus 2024].
- Wello, E. A., Safei, I., Juniarty, S., & Kadir, A. (2021). Literature review faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak balita. *Fakumi Medical Journal: Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 1(3), 234-240.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.